



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DESA GARAHAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER DALAM MELAKUKAN MITIGASI DAMPAK EKONOMI DIMASA PENDEMI COVID-19.

Rian Fikri Maulana<sup>1</sup>, Itok Wicaksono<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received Maret 2024

Revised Maret 2024

Accepted Maret 2024

Available online Maret 2024

[Ryanfikri1999@gmail.com](mailto:Ryanfikri1999@gmail.com),

[itokwicaksono@unmuhjember.ac.id](mailto:itokwicaksono@unmuhjember.ac.id)

[Ryanfikri1999@gmail.com](mailto:Ryanfikri1999@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Bandar Lampung

## Abstrak

Hasil observasi pada masyarakat di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memanfaatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, namun digunakan untuk hal lain. Agar masyarakat dapat menggunakan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di butuhkan lah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berperan dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian itu yaitu untuk mengetahui apa yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai fasilitator di Desa

Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pendamping sosial dalam penyaluran PKH di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah tampak baik dalam melakukan peranannya sebagai wakil dan juga telah melakukan berbagai peran teknis secara maksimal. hal ini dapat terlihat pada setiap perubahan status anggota keluarga, pendamping sosial PKH menjadi perwakilan keluarga tersebut untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan kecamatan. Dan juga dapat melakukan verifikasi, pengisian form data keluarga penerima manfaat PKH, serta diharuskan untuk membuat laporan setiap bulan untuk

## 1. Pendahuluan

Secara umum prestasi kerja diartikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Orang yang berprestasi berarti orang



---

dalam melaksanakan pekerjaannya dapat memberikan hasil yang baik, serta dalam waktu yang ditentukan dan berkualitas. Tingginya prestasi kerja seseorang di pengaruhi oleh dorongan yang disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki seseorang merupakan potensi yang memerlukan tenaga penggerak. Peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Artinya setiap tindakan yang dimiliki memiliki arti penting bagi sebagian orang. Sedangkan kepala desa adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan misi pemerintah. Mitigasi dapat diartikan segala upaya untuk mengurangi resiko bencana.

Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi, ditingkat global. Kinerja sebagian besar sektor industri menurun. Dalam rangka melakukan mitigasi dampak covid-19 terhadap perekonomian desa garahan kecamatan silo kabupaten jember. Menurut UU nomor 24 tahun 2007, mengatakan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. wabah ini bukan hanya mengancam kesehatan saja, tetapi juga mengancam perekonomian dan kegiatan manusia sehari-hari. Di negara kita sendiri ada beberapa istilah yang digunakan untuk menegaskan aturan new normal yaitu PSBB dan PPKM. new normal yang dimaksud sendiri yaitu menyesuaikan diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M yaitu ; memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan mencuci tangan sesudah atau sebelum melakukan aktifitas. Beragam cara yang dilakukan dalam upaya yang dilakukan kesiapsiagaan bencana disaat kondisi pandemi covid 19 ini. Bencana covid 19 menjadi beban ganda kemanusiaan, karna tidak bisa dihindari, pandemi membatasi ruang gerak yang membuar dampak bencana makin terasa, karena terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Ketika pandemi muncul dinamika sosial terjadi oleh sebab itu masyarakat menjadi kesulitan memenuhi hidupnya. Dampaknya menjadi semakin berat berat khususnya seperti masyarakat yang memiliki kebutuhan relatif tinggi dan berbeda-beda termasuk masyarakat disabilitas.

Pada akhir 2019, dunia dikejutkan dengan adanya covid 19 yang pertama kali terdeteksi di wuhan cina. Virus tersebut menyebar sangat cepathingga keseluruh dunia, tak terkecuali di indonesia. Hingga pada tahun 2022 meskipun telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya, tetapi belum diketahui kapan segala hal kembali normal. Pemerintah indonesia melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah berupaya untuk memulihkan keadaan ekonomi nasional dan penanganan covid 19 salah satunya melalui program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah (APBD) kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. yaitu salah satunya mengatasi perekonomian masyarakat.



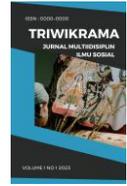
---

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Jika di pandang dari segi ekonomi, pendapatan masyarakat desa garahan masih jauh dari kata makmur, padahal sebagian besar wilayah terdiri dari lahan untuk bercocok tanam seperti sawah dan tegalan. Disisi lain, rendahnya perekonomian desa garahan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi hambatan perkembangan perekonomian didesa garahan. Maka dari itu, kepala desa garahan mempunyai program untuk masyarakatnya. Undang- undang nomer 6 tentang desa 1(12) pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalh dan priorias kebutuhan masyarakat desa.

Program desa garahan untuk mengatasi mitigasi akibat dampak pandemi covid 19 ini salah satunya kepala desa mengabil kebijakan kepada masyarakat desa garahan untuk menggratiskan pajak tanah dan pembuatan sertifikat tanah gratis Kondisi geografis desa garahan yang masih banyak lahan pertanian, perbatasan gunung gumitir, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kendala ekonomi menurunnya para peternak di akibatkan pada masa pandemi covid 19 ini yaitu ditutupnya pasar jual beli hasil ternak karena para peternak mayoritas mendapat penghasilan lebih tinggi pasar jual beli ternak akibat dari itu pendapatan ekonomi kurang maksimal atau bisa juga menurun drastis. Program yang kedua untuk mengatasi ekonomi dampak covid 19 ini yaiyu desa melakukan pembagian dana desa sebesar Rp 100000000 (sepuluh juta rupiah) kepada setiap RT di desa garahan dan ini sudah berjalan mulai tahun 2019. Medapat ka blt pebiulan 4000 dampak covid 19.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang di jadikan referensi oleh peneliti dalam penulisan ini. Penelitian oleh Eko Suprianto (2022) Judul penelitiannya yaiu peran dana desa dalam pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid 19. Berdasarkan peraturan menteri desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 , dana desa di prioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan, pembentukan, pengembangan , dan peningkatan kapasitas pengolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana non alam. Kedua, penelitian oleh Moh. Hadori (2022) Judul penelitiannya yaitu Implemetasi Kebijakan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam



---

Bentuk Pasar Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa di desa tlagah kecamatan banyuates kabupaten sampang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya ialah kantor desa tlagah kecamatan banyuates kabupaten sampang. Teknik pengambilan yang dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa di tlagah kecamatan banyuates kabupaten sampang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan implementasi kebijakan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar di desa tlagah sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Selanjutnya, penelitian oleh Ayu Fauziah Suryadi (2021) Judul penelitian ini yaitu peran kepala desa di masa pandemi covid 19 (suatu studi di kecamatan bangkala barat kabupaten jeneponto) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemudian mendeskripsikan peran yang dilakukan kepala desa dalam menghadapi covid-19 serta kendala apa yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan kepala desa di kecamatan bangkala barat kabupaten jeneponto dalam hal ini desa beroanging, desa barana serta kel. Bulujaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta adapun teknik analisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan kepala desa di masa pandemi sudah sangat bagus. Karena kepala desa sudah melakukan pen cegahan atau penanggulangan terkait covid-19 seperti meperadakan posko-posko disetiap perbatasan keluar masuk desa, mengadakan sosialisai, membagikan masker, meperadakan tempat cuci tang di beberapa titik, meperadakan bantuan BLT dari dana desa, serta melakukan penyemprotan di senfektan. Kendala yang dihadapi yakni pembangunan infrastruktur desa menjadi terlambat karena dana dialihkan untuk menanggulangi dampak covid-19 serta aktifitas masyarakat menjadi terbatas sehingga juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Upaya yang ditwarkan oleh kepala desa seperti, tetap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya tetap memetahi protocol kesehatan serta melakukan pengawasan ditempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti di pasar-pasar.

### **Implementasi Kebijakan**

Konsep dari implentasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh satu keputusan. Implementasi kebijakan publik salah satu tahapan yang penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu dapat dilihat dari beberapa pendapat dibawah tentang implementasi kebijakan publik.

#### ***George Edward III***

Teori yang dikemukakan oleh george edward III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat



---

berhasil, menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (disposition atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edward III sebagai berikut:

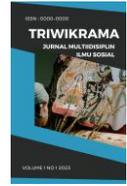
**a. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dasar dan tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan dengan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

**b. Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksanaan kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar meningkat program. Ketidakmampuan pelaksanaan program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam pelaksanaan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik kelistrikan. Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksana kebijakan. Kekurangan informasi atau pengetahuan serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang dilakukan para pelaksana di lapangan. Sumberdaya lain yang penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kemampuan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

**c. Disposisi atau Sikap**



Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati jika pandangan berbeda dengan pembuatan kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksanaan, petunjuk atau arahan pelaksanaan atau merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pemimpin sangat mempengaruhi pelaksanaan program dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksanaan program. Penempatan pelaksanaan dengan orang-orang yang mendukung program, memerhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dengan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan atau program.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan yaitu;

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksanaan;
3. Sumber-sumber politik dalam organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalisasi suatu organisasi;
5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana

keputusan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

### 3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Fokus penelitian pada penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi peran desa garahan di kecamatan silo pada saat pandemi covid-19. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain data tersebut peneliti juga memperkuat dengan data sekunder berupa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan langkah awal observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dikumpulkan, dirangkum/direduksi, kemudian data di paparkan dengan pembahasan dan terakhir ditarik kesimpulan.

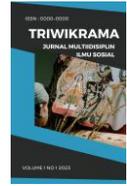
### 4. Hasil dan Pembahasan

#### Sumber Daya (Kebun Kopi)

Desa garahan, kecamatan silo, kabupaten jember merupakan salah satu produsen biji kopi di kabupaten jember (BPS jember,2008). Berdasarkan data profil desa garahan(Bapemas,2006), sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, mayoritas sebagai petani kopi robusta. Pendapatan dari kopi mencapai 75% dari total pemenuhan kebutuhan hidup petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk desa garahan menggantungkan kehidupannya pada potensi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki.

Banyaknya masyarakat mempunyai lahan tanah di hutan dikarenakan pada jaman kepresidenan gusdur. Pada masa pemerintahan gusdur telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung masyarakat kecil seperti petani dan nelayan melalui kebijakan *land reform*. Sebuah kebijakan yang memberikan petani kuasa atas lahannya. Atas kebijakan itulah kekuasaan petani atas tanahnya meningkat kebijakan itu kemudian mengubah jalan hidup kecamatan silo kabupaten jember. Sebab saat itu gusdur membuat pernyataan "*hutan untuk rakyat*", pernyataan itu kemudian menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengambil hasil hutan secara suka-suka, setelah mendapatkan kesempatan untuk berpatisipi mengelola hutan, utamanya bertani dilahan perhutani sehingga masyarakat desa garahan memulai menanam ikopi, jenis kopi yang ditanam adalah kopi robusta dan arabika atau yang dikenal masyarakat sebagai kopi thailand, kopi yang memiliki harga jual tinggi. Dari hasil kopi, kesejahteraan para petani kopi meningkat sebagian masyarakat biasa menunahkan ibadah haji, sebagian lagi digunakan untuk modal dan membeli transportasi untuk mengangkut hasil panen kopi.

Meskipun pandemi covid-19 belum kunjung usai, namun angin segar mulai menghembus bagi warga yang tiap tahun menjadi buruh petik kopi atau pekerja harian pemetik kopi dilahan



---

perkebunan milik masyarakat yang memiliki lahan kebun kopi. Biasanya memasuki awal bulan juni hingga september, menjadi bulan yang cukup sibuk bagi masyarakat desa garahan yang memiliki lahan kebun kopi dan buruh pemetik kopi karena panen raya kopi yang meningkat.

### **Pemasaran Bubuk Kopi Desa Garahan**

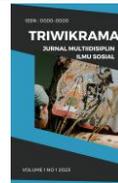
Pemasaran bubuk kopi desa garahan ini salah satunya pemerintah desa juga memasarkan di media online. Bermodal media online masih belum cukup untuk memasarkannya akhirnya pemerintah desa dan masyarakat berkerjasama untuk memasarkan kopi bubuk. pemerintah desa berkomunikasi dengan dosen untuk ikut serta di pameran di sari utama jember. Masyarakat pemilik kopi bubuk memasarkan secara door to door ke kefe-kafe jember dan banyuwangi namun dalam usahanya itu banyak yang menolak produk bubuk kopi garahan dengan berbagai macam alasan. Di lain kesempatan kabar dari pemerintah desa muncul dan menyuruh ibu sakdiyah mempersiapkan produk kopinya untuk di pasarkan di sri utama jember. Untuk bisa mengikuti pameran itu ibu sakdiyah memproduksi kopi yang digoreng sendiri tanpa rasa lelah dikarenakan keterbatasan modal dan juga tidak lelah untuk menitipkan produk kopinya di toko-toko jember dan banyuwangi sehingga ibu sakdiyah untuk pertama kalinya ia mendapatkan omset perdana Rp 250.000. dari situ ibu sakdiyah step by step dengan rajin menitipkan dan memasarkan produk kopinya ditoko-toko jember.

### **Pemanfaatan limbah kulit biji kopi (Jamur Merang)**

Selain hasil kopi yang digunakan untuk kebutuhan hidup juga masyarakat memanfaatkan limbah kulit kopi yang hanya di manfaatkan sebagai pupuk kompos yang dibiarkan begitu saja dan juga di manfaatkan sebagai pakan ternak sehingga Ada juga masyarakat yang kreatif yaitu membukakan peluang usaha petani desa garahan kabupaten jember melalui agribisnis jamur merang dengan pemanfaatan limbah kopi. Pemanfaatan limbah perkebunan kopi yang dihasilkan setiap hari dapat dijadikan peluang usaha yang kreatif ,, inovatif dan bernilai ekonomi. Limbah kulit biji kopi disekitar perkebunan kopi desa garahan kecamatan silo kabupaten jember merupakan peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar perkebunan yaitu agribisnis jamur merang (*Volvaria Volvaceae*) dimana tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani desa Garahan.

### **Komunikasi**

Kepala desa kepada masyarakat desa garahan “dimasa covid ini kita sebagai masyarakat desa garahan saat ini sebagian besar masyarakat desa garahan kesulitan mencari ekonomi untuk keluarga kita, untuk itu kita sebagai masyarakat desa garahan untuk saling membantu satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain untuk sebagian pedagang jangan putus asa hanya karena pasar sekarang ditutup, bagi para warga sebagian yang memiliki lahan kebun kopi terimalah msaudara kalian yang terhambat profesinya sebab masa pandemi covid ini untuk jadi buruh untuk sementara. Untuk sebagian masyarakat yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran jangan berkecil hati karena desa akan memberikan bantuan stimulus Rp 10.000.000/RT.



---

### **Bantuan Stimulus Rp 10.000.000/RT**

Bantuan stimulus Rp 10.000.000/RT ini merupakan program yang dijalankan oleh kepala desa untuk melakukan mitigasi desa garahan menurunnya ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19 ini. Bantuan stimulus ini tidak lain bersumber dari dana kas desa yang disalurkan kepada setiap RT di desa garahan untuk membangun usaha. Bantuan stimulus Rp 10.000.000/RT dijadikan ternak kambing. Kebanyakan masyarakat desa garahan dalam mengolah dana stimulus ini yaitu dijadikannya ternak, maka dana stimulus tersebut oleh masyarakat desa garahan dibelikan sepasang kambing pejantan dan betina untuk dipelihara dan nantinya jika kambing itu sudah beranak maka anak kambing tersebut dibagi hasil yaitu jika sepasang kambing melahirkan 2 anak kambing maka yang satu diberikan kepada masyarakat yang memelihara dan yang satu anak kambing lagi dimasukkan pada kas desa tapi tidak berupa uang tunai melainkan tetap menjadi anak kambing dan anak kambing milik kas desa ini boleh dipelihara oleh masyarakat lainnya untuk dipelihara hingga berkembangbiak lagi dan seterusnya seperti itu.

### **5. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa garahan yang ekonominya menurun dan minimnya lapangan kerja dampak covid-19 menjadikan salah satu alasan dilakukannya mitigasi. Penelitian ini mengenai "Implementasi Kebijakan Kepala Desa Kecamatan Silo Kabupaten Jember Dalam Melakukan Mitigasi Dampak Ekonomi Dimasa Pandemi Covid-19" penelitian ini menggunakan teori penelitian ini menggunakan teori **George Edward III** yang terdiri dari 4 hal, tetapi disini peneliti menggunakan 2 hal saja yaitu;

Pertama, komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat desa garahan sudah cukup baik, mengenai permasalahan atau kendala yang ada pada program mitigasi.

Kedua, sumber daya di desa garahan yaitu kebun kopi dengan arahan dari kepala desa untuk saling membantu sesama masyarakat yang dulunya memetik kebun kopi hanya pemilik kebun dan keluarganya dan sekarang pemilik kebun kopi membuka lapangan pekerjaan untuk jadi buruh pemetik kopi dan hal itu sama- sama menguntungkan bagi masyarakat desa garahan.

### **Daftar Referensi**

Ayu Fauziah Suryadi(2021)*peran kepala desa di masa pandemi covid 19(suatu studi di kecamatan bangkala barat kabupaten jeneponto)*

Eko,Supriyanto. 2022. Peran Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Penanganan Covid-19



---

## **Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**

Volume 03, Number 03 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

---

Muh. Hadori (2020). *Implementasi kebijakan kepala desa terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk pasar desa*. *Jurnal fisipol*.2020.

Dito, adtia darma *dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian indonesia*

<https://ejournal.ildkti10.id/index.php/banefita/article/view/5313,2020>

George,<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implentasi-kebijakan-george-edward-iii/>

SMERU, Global, Network *studi dampak sosial-ekonomi pandemi covid-19 di*

*indonesia*<https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia.2020>

### **Landasan UU**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial

UU nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial